



DOI 10.22437/jiseb.v22i1.6424

## **ANALISIS KOMPARASI DAYA SAING EKSPOR LADA INDONESIA TERHADAP VIETNAM DAN MALAYSIA DI PASAR ASEAN**

*Analysis Of Indonesia's Pepper Competition Of Experience Of Vietnam And Malaysia In  
Asean Market*

Yulistiana Endah Utami<sup>1)</sup>, M. Syamsul Maarif<sup>1)</sup>, Idqan Fahmi<sup>1)</sup>, Arif Imam Suroso<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

email: utami07@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Indonesia has the hope of becoming the world's largest cocoa producer and has a strong cocoa processing industry in the world. The challenge is the production of cocoa beans produced cocoa farming can not meet the needs of the raw materials processing industry in the country, so there is a gap between the production of cocoa beans from the farm to the need / demand for raw materials cocoa beans from the cocoa processing industry in the country. This study aimed to conduct development strategy formulation cocoa farming in Indonesia. The formulation of strategies in this study was based on justification from stakeholders using Analytic Hierarchy Process (AHP) analysis tools. The results from the AHP analysis showed that the most effective strategy for the development of cocoa farming in the study regions is the development of farmer institutions and assistance in applying technology (weight value of 0.309). The most important objective for the development of cocoa farming is to increase the production and quality of cocoa beans (weight value of 0.503). The key actor who plays an important role in the development of cocoa farming is the government, both central and local (weight value of 0.269). The most important factor to be considered in the development of cocoa farming is human resources (weight value of 0.193). Based on these results, it is recommended to strengthen the development of cacao farmers through a form of business entity owned by farmers who are accompanied by the government*

*Keywords: farmers institution, increasing cacao's production, farmers welfare*

### **ABSTRAK**

Indonesia memiliki harapan untuk menjadi produsen biji kakao terbesar dunia dan memiliki industri pengolahan kakao yang kuat di dunia. Tantangan yang dihadapi adalah

produksi biji kakao yang dihasilkan usahatani kakao belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan dalam negeri, sehingga terjadi gap antara produksi biji kakao dari usahatani kakao dengan kebutuhan/permintaan bahan baku biji kakao dari industri pengolahan kakao dalam negeri. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perumusan strategi pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Perumusan strategi berdasarkan justifikasi dari pemangku kepentingan dengan menggunakan alat analisis *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Hasil Analisa AHP menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif untuk pengembangan usahatani kakao adalah dengan pengembangan kelembagaan petani dan pendampingan penerapan teknologi yang memiliki nilai bobot 0,309. Tujuan yang paling utama untuk pengembangan usahatani kakao adalah peningkatan produksi dan mutu biji kakao, dengan perolehan nilai bobot 0,503. Aktor yang berperan penting dalam pengembangan usahatani kakao adalah pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan perolehan nilai bobot 0,269. Faktor yang paling penting untuk menjadi perhatian dalam pengembangan usahatani kakao adalah sumberdaya manusia, dengan perolehan nilai bobot 0,193. Dengan berdasarkan pada hasil analisa AHP tersebut, maka direkomendasikan untuk memperkuat kelembagaan petani dengan suatu bentuk badan usaha milik petani yang didampingi oleh pemerintah..

kata kunci : kelembagaan petani, meningkatkan produksi kakao, kesejahteraan petani

## PENDAHULUAN

Kakao adalah salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kakao adalah bahan baku pembuatan coklat, yang menjadi makanan dan minuman favorit bagi banyak orang di dunia. Di Indonesia, kebun kakao menempati luas areal keempat terbesar setelah kelapa sawit, kelapa dan karet (Pusdatin Kementan, 2017). Kakao memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara nomor tiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet (Hasibuan *et al.*, 2012). Pada tahun 2016, dari total nilai ekspor perkebunan sebesar US\$ 25.54 miliar, nilai ekspor kelapa sawit sebesar US\$ 16.81 miliar, karet US\$ 3.37 miliar, dan kakao US\$ 1.24 miliar (Pusdatin Kementan 2017).

Indonesia adalah satu dari empat negara utama pelaku perdagangan biji kakao dunia, di mana Pantai Gading menjadi produsen dan eksportir utama biji kakao dunia, diikuti Ghana, Indonesia, dan Nigeria (Syadullah, 2012; Fitriana *et al.*, 2014). Indonesia dan Ghana bergantian menempati posisi kedua dan ketiga sebagai produsen dan eksportir biji kakao dunia. Total produksi biji kakao dunia menunjukkan tren meningkat, dari 4.2 juta ton di tahun 2009 menjadi 4.6 juta ton di tahun 2013, sementara ekspor biji kakao dunia memperlihatkan tren fluktuatif, dari 2,9 juta ton di tahun 2009 menjadi 2.7 juta ton di tahun 2013 (Pusdatin Kementan, 2016).

Meskipun Indonesia telah diperhitungkan sebagai pelaku perdagangan kakao dunia, namun nilai daya saing biji kakao Indonesia jika dibandingkan dengan negara pelaku perdagangan biji kakao lain relatif lebih kecil. Salah satu indikator daya saing adalah Nilai

*Revealed Comparative Advantage* (RCA). Nilai RCA biji kakao Indonesia menunjukkan nilai paling kecil dibandingkan negara pengekspor biji kakao yang lain. Pada tahun 2010, nilai RCA biji kakao Indonesia sebesar 13.6, sementara Pantai Gading sebesar 438.45, dan Ghana 292.91, serta Nigeria sebesar 21.0 (Hasibuan *et al.*, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan daya saing dan memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi, maka Indonesia harus meningkatkan ekspor produk kakao olahan dibandingkan mengekspor biji kakao (Syadullah, 2012; Maulana dan Kartiasih 2017).

Untuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor produk kakao olahan, sejak tahun 2010 Indonesia memberlakukan kebijakan Bea Keluar (BK) biji kakao. Kebijakan ini bertujuan agar biji kakao tidak diekspor melainkan diolah oleh industri dalam negeri dan kemudian diekspor dalam bentuk kakao olahan (Syadullah, 2012; Suryana *et al.*, 2014). Bila selama ini ekspor kakao Indonesia didominasi oleh ekspor biji mentah, maka dengan pengenaan tarif bea keluar diharapkan pelaku usaha kakao di dalam negeri akan mengolah terlebih dahulu sehingga nilai tambah kakao dapat dinikmati oleh para pelaku usaha kakao di dalam negeri. Kebijakan BK terbukti berhasil, di mana ekspor biji kakao menurun dari 410.3 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 355.3 ribu ton pada tahun 2015 (Pusdatin Kementan, 2016), sebaliknya nilai ekspor kakao olahan cenderung naik, yaitu dari sebesar US\$ 278.5 juta pada tahun 2007 menjadi US\$ 613.5 juta pada tahun 2013 (Pusdatin Kementan, 2016).

Sejak diterapkan kebijakan BK pada biji kakao, permintaan biji kakao dalam negeri mengalami peningkatan karena semakin banyak investor tertarik untuk investasi di Indonesia (Syadullah, 2012; Mulyono, 2016). Data AIKI (2017) memperlihatkan bahwa jumlah industri pengolahan kakao meningkat dari 16 unit pada tahun 2010 menjadi 20 unit pada tahun 2016. Di sisi lain, laju pertumbuhan industri pengolahan kakao belum diimbangi dengan laju pertumbuhan produksi biji kakao yang dihasilkan dari usahatani kakao. Data statistik kakao memperlihatkan bahwa produksi biji kakao menurun dari 671 ribu ton di tahun 2007 (BPS, 2017) menjadi 629 ribu ton di tahun 2016 (Ditjenbun Kementan, 2018). Akibatnya kapasitas terpakai industri pengolahan hanya mencapai 392 ribu atau kurang dari separuhnya dari 800 ribu kapasitas terpasang (AIKI, 2017). Indonesia kemudian melakukan impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan (Syadullah, 2012). Impor kakao sebesar 43.53 ribu ton di tahun 2007, naik menjadi 139.99 ribu ton pada tahun 2014, dan turun lagi menjadi 105.15 ribu ton pada tahun 2016 (BPS, 2017). Impor biji kakao belum dapat memenuhi kekurangan bahan baku, karena Indonesia juga membatasi masuknya impor biji kakao dengan menerapkan kebijakan bea masuk sebesar 5 persen. Penerapan bea masuk dimaksudkan untuk melindungi petani kakao Indonesia agar masih tetap memiliki insentif berupa pasar dalam negeri untuk berproduksi.

Produksi biji kakao yang dihasilkan usahatani kakao belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan dalam negeri, sehingga terjadi gap antara produksi dari usahatani kakao dengan kebutuhan/permintaan bahan baku biji kakao dari industri pengolahan kakao dalam negeri. Laju pertumbuhan industri pengolahan kakao belum diimbangi dengan laju pertumbuhan produksi biji kakao yang dihasilkan dari usahatani kakao. Untuk menutupi kesenjangan bahan baku industri pengolahan dilakukan impor biji kakao yang volumenya terus meningkat. Produksi biji kakao yang besar sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan kakao dalam negeri. Indonesia memiliki harapan untuk menjadi produsen biji kakao terbesar dunia dan memiliki industri pengolahan kakao yang kuat di dunia (Barani, 2010; Kementan dan Bappenas, 2011).

RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementan 2015-2019 juga mengamanahkan tercapainya kedaulatan pangan yang bermakna bahwa Indonesia harus mampu memproduksi dan mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri secara mandiri, termasuk industri yang menjadi andalan ekspor, yaitu kakao. Dalam rangka melaksanakan amanah rencana nasional dan keinginan mencapai harapan tersebut, maka diperlukan strategi guna menanggulangi permasalahan yang dihadapi usahatani kakao di Indonesia agar dapat meningkatkan produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan kakao dalam negeri. Penelitian ini bertujuan mengajukan alternatif strategi bagi pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Strategi disusun berdasarkan justifikasi dari para pemangku kepentingan terkait pengembangan usahatani kakao di Indonesia dengan menggunakan analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

## METODE PENELITIAN

Analisis AHP dimulai dengan menyusun hirarki yang terdiri dari beberapa elemen, dan setiap elemen terdiri dari beberapa unsur. Hirarki AHP strategi pengembangan usahatani kakao ini terdiri dari elemen faktor, aktor, tujuan dan alternatif strategi. Hasil analisis faktor yang mempengaruhi usahatani kakao berdasarkan perspektif petani yang telah dilakukan sebelumnya (Utami *et al.*, 2018) mengisi elemen faktor, sementara elemen aktor, tujuan dan strategi diperoleh dari literatur dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Struktur elemen dalam hirarki AHP tersebut meliputi:

1. Elemen faktor adalah faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan usahatani kakao. Analisis faktor yang mempengaruhi usahatani kakao berdasarkan perspektif petani dengan menggunakan metode *structural equation modeling* (SEM) (Utami *et al.*, 2018) menghasilkan tujuh faktor yaitu: permodalan, sumberdaya alam (SDA), kelembagaan, pemasaran, kebijakan, teknologi, dan sumberdaya manusia (SDM). Pada pembahasan bersama para pemangku kepentingan, diperoleh satu tambahan faktor

yaitu tata kelola pemerintahan, sehingga jumlah faktor dalam hierarki AHP menjadi delapan.

2. Elemen aktor adalah aktor yang dinilai berperan dalam pengembangan usahatani kakao. Dari literatur dan pembahasan bersama pemangku kepentingan diperoleh aktor yang dinilai berperan penting dalam pengembangan usahatani kakao, yaitu: pemerintah (pusat dan daerah), petani, penyuluh dan petugas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keuangan, industri pengolahan, serta penelitian dan pengembangan (Murwito dan Mulyati, 2013, Listiyati *et al.*, 2014, Jaweng *et al.*, 2016).
3. Elemen tujuan adalah tujuan yang diharapkan dalam pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Terdapat tiga tujuan yang dinilai penting untuk pengembangan usahatani kakao di Indonesia, yaitu: (1) produksi dan mutu biji kakao, (2) harga biji kakao, dan (3) kesejahteraan petani kakao. Ketiga tujuan pengembangan usahatani kakao tersebut merupakan hasil pembahasan dari forum pemangku kepentingan dan sejalan dengan pendapat Barani (2010), Syadullah (2012), dan Mulyono (2016).
4. Elemen strategi adalah alternatif strategi yang dapat dijalankan untuk pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Terdapat empat alternatif strategi yang mengemuka dari forum pembahasan para pemangku kepentingan, yaitu: (1) pengembangan kelembagaan dan pendampingan dalam penerapan teknologi, (2) perluasan akses permodalan, (3) regulasi kemitraan dengan pedagang dan industri, dan (4) sinergitas pemangku kepentingan.

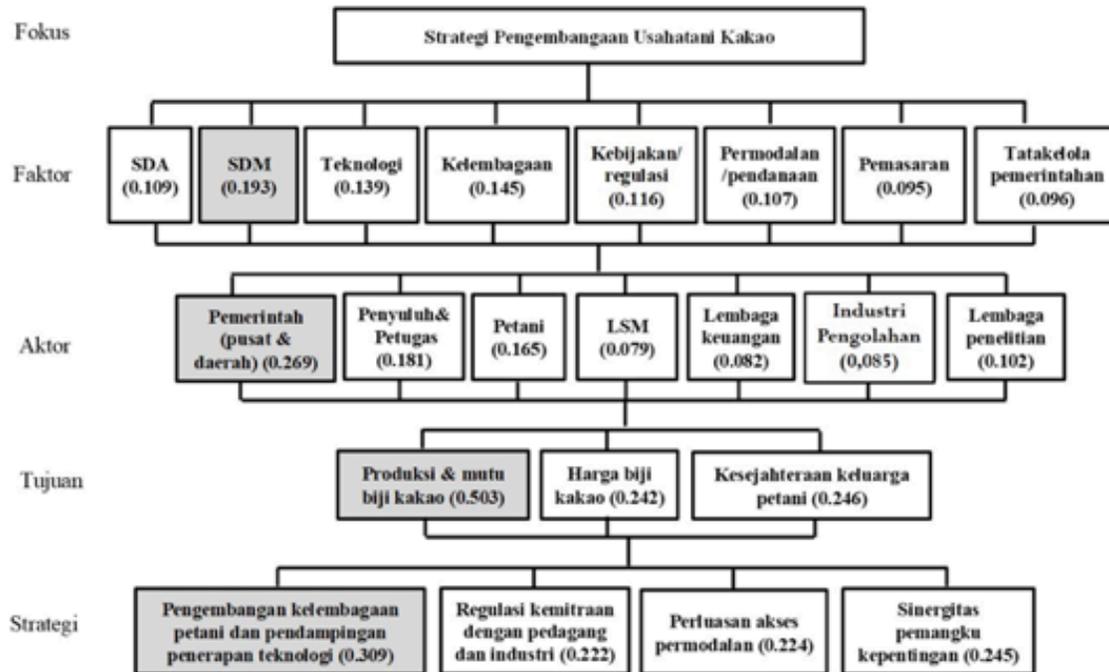
Setelah struktur hirarki AHP selesai disusun maka kemudian dipindahkan ke kuesioner dalam bentuk matrik berpasangan, dan selanjutnya dimintakan pemangku kepentingan untuk melakukan pengisian kuesioner. Kuesioner yang telah diisi kemudian diolah menggunakan program *Expert Choice*. Penilaian pemangku kepentingan pada matrik berpasangan dicek nilai konsistensi rasio, di mana harus  $\leq 10\%$ .

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dan survei kepada pemangku kepentingan untuk menyusun struktur hirarki AHP dan menentukan tingkat kepentingan unsur pada setiap tingkatan elemen dalam struktur AHP. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil survei petani kakao (Utami *et al.*, 2018), dan beberapa literatur lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis faktor yang mempengaruhi usahatani berdasarkan perspektif pemangku kepentingan dengan menggunakan metode AHP memperlihatkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi usahatani kakao di Indonesia secara berurutan adalah sumberdaya manusia (bobot 0.193), kemudian diikuti kelembagaan (bobot 0.145), teknologi (0.139), kebijakan atau regulasi (0.116), sumberdaya alam (0.109), permodalan atau pendanaan

(0.107), tata kelola pemerintahan (0.096), serta pemasaran (0.095). Secara lengkap hasil analisis AHP disajikan pada Gambar 1. Berikut adalah penjelasan berkaitan dengan keterkaitan semua unsur dalam elemen pembentuk struktur hirarki strategi pengembangan usahatani kakao.



Gambar 1 Struktur hirarki hasil analisis AHP

Hasil analisis AHP memperlihatkan bahwa SDM tampil sebagai faktor paling dominan dalam upaya pengembangan usahatani kakao (Tabel 1). Hal ini sejalan dengan pernyataan Hernanto (1990) bahwa petani adalah pelaku utama usahatani. Saat ini, banyak petani kakao yang masih belum serius mengurus kebunnya. Hal ini ditunjukkan antara lain dari laporan evaluasi dan studi yang dilaksanakan oleh Kementan dan Bappenas (2011), Ditjenbun Kementan (2013), Murwito dan Mulyati (2013), Rheza dan Karlinda (2013), Jaweng et al. (2016), yang menyampaikan bahwa di sebagian besar provinsi yang dilakukan evaluasi, petani tidak meneruskan pemeliharaan sesuai standar teknis setelah program Gernas berakhir (Kementan dan Bappenas, 2011). Sekitar 50 persen petani kakao yang melakukan pemeliharaan setelah tahun pertama, dan hanya sekitar 20 persen setelah tahun kedua (Ditjenbun Kementan, 2013). Kurangnya minat petani merawat kebun juga dapat dilihat dari indikator kehadiran pada pelatihan yang diselenggarakan pada Program Gernas Kakao. Dari survei evaluasi Gernas Kakao di Kabupaten Majene disampaikan bahwa kehadiran petani pada pelatihan masih sangat sedikit. Di tahun 2009, hanya 253 orang atau 8.9 persen dari total 2832 petani yang datang ikut pelatihan. Di tahun 2012, kepesertaan petani menurun lagi menjadi hanya 282 orang atau 2.7 persen dari total 12289 orang petani yang dijadualkan ikut

pelatihan. Secara total, tingkat partisipasi pelatihan kurang dari 9 persen dari total petani kakao di Majene (Rheza dan Karlinda 2013).

Hasil analisis faktor yang mempengaruhi usahatani berdasarkan perspektif petani menyebutkan bahwa aspek SDM yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu, upaya pengembangan usahatani kakao, tidak hanya ditujukan bagaimana meningkatkan minat dan motivasi petani kakao agar mau mengurus kebun kakaonya, namun juga harus memikirkan bagaimana mengatasi persoalan tenaga kerja yang diperlukan dan meningkatkan pengalaman petani untuk mengurus kebun kakao. Harus diupayakan untuk mencari cara agar petani aktif mengikuti pelatihan, karena di dalam pelatihan aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan berusahatani dengan teknik budidaya yang tepat dapat ditingkatkan.

**Tabel 1 Hubungan faktor dengan fokus**

| Alternatif faktor        | Bobot | Prioritas |
|--------------------------|-------|-----------|
| Sumberdaya alam (SDA)    | 0.109 | 5         |
| Sumberdaya manusia (SDM) | 0.193 | 1         |
| Teknologi                | 0.139 | 3         |
| Kelembagaan              | 0.145 | 2         |
| Kebijakan/regulasi       | 0.116 | 4         |
| Permodalan/pendanaan     | 0.107 | 6         |
| Pemasaran                | 0.095 | 8         |
| Tata kelola pemerintahan | 0.096 | 7         |

Kelembagaan menjadi faktor prioritas nomor dua setelah SDM. Pada survei kepada petani yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang tidak jauh berbeda, dimana kelembagaan menempati urutan ketiga terpenting sebagai faktor yang mempengaruhi usahatani kakao. Hal ini mengisyaratkan bahwa setelah dilakukan intervensi pada faktor SDM, langkah berikutnya adalah melakukan pembentukan atau pembenahan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 19/2013 Pasal 74 menegaskan bahwa Kelompok tani dan Gabungan kelompok tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi.

Teknologi menjadi faktor prioritas nomor tiga. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi harus menjadi perhatian penting dalam upaya pengembangan usahatani kakao. Dari hasil analisis faktor yang mempengaruhi usahatani kakao berdasarkan perspektif petani menunjukkan bahwa teknologi yang penting dalam pengembangan usahatani kakao mencakup mulai dari hulu sampai hilir, yaitu bibit, varietas, pupuk, pestisida, pemeliharaan budidaya, panen dan pasca panen. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tanaman kakao adalah karena mutu bahan tanam (bibit dan varietas) yang kurang unggul. Saat ini, rata-rata produktivitas tanaman kakao baru mencapai 798 kilogram per hektar, masih jauh dari potensinya yang bisa mencapai 2 ton per hektar (Pusdatin Kementan, 2016). Pada dasarnya sudah cukup banyak klon-klon unggul yang dihasilkan oleh Lembaga penelitian kakao. Kementerian Pertanian melalui beberapa Surat Keputusan Menteri Pertanian telah melepas beberapa klon kakao unggul seperti ICCRI 01, 02, 03, 04, 05; Sulawesi 01, 02, 03;

dan Scavina 6 (Mulyono, 2016). Persoalannya bagaimana mendorong penggunaan klon kakao unggul tersebut secara lebih luas oleh petani kakao. Selanjutnya, perlu juga mendorong petani agar mau lebih menerapkan praktek budidaya yang mencakup budidaya, panen dan panen sesuai anjuran atau *Good Agricultural Practices* (GAP).

### Hubungan Aktor dengan Faktor

Hasil pengolahan AHP yang ditampilkan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa pemerintah (pusat dan daerah) secara keseluruhan memiliki peran yang paling dominan dibandingkan aktor lain pada semua faktor, kecuali pada faktor sumberdaya alam (SDA) dan faktor pemasaran. Unsur pemerintah menjadi dominan dapat diterangkan dari peran dan fungsinya sebagai pembuat kebijakan serta memberikan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan. Melalui tugas dan fungsinya tersebut, pemerintah berperan penting dalam mendorong terlaksananya pengembangan kakao.

**Tabel 2 Hubungan aktor dengan faktor**

| Faktor                   | Aktor        |                      |              |              |                  |                     |              |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|
|                          | Pemerintah   | Penyuluh dan Petugas | Petani       | LSM          | Lembaga Keuangan | Industri Pengolahan | Litbang      |
| SDA                      | 0.228<br>(2) | 0.264<br>(1)         | 0.169<br>(3) | 0.073<br>(7) | 0.078<br>(6)     | 0.079<br>(5)        | 0.109<br>(4) |
| SDM                      | 0.243<br>(1) | 0.236<br>(2)         | 0.174<br>(3) | 0.084<br>(6) | 0.086<br>(5)     | 0.064<br>(7)        | 0.113<br>(4) |
| Teknologi                | 0.234<br>(1) | 0.212<br>(2)         | 0.160<br>(4) | 0.081<br>(5) | 0.067<br>(7)     | 0.073<br>(6)        | 0.172<br>(3) |
| Kelembagaan              | 0.285<br>(1) | 0.207<br>(2)         | 0.169<br>(3) | 0.106<br>(4) | 0.080<br>(6)     | 0.066<br>(7)        | 0.087<br>(5) |
| Kebijakan/<br>Regulasi   | 0.336<br>(1) | 0.205<br>(2)         | 0.149<br>(3) | 0.062<br>(7) | 0.071<br>(6)     | 0.072<br>(5)        | 0.104<br>(4) |
| Permodalan/<br>Pendanaan | 0.297<br>(1) | 0.098<br>(5)         | 0.136<br>(3) | 0.097<br>(6) | 0.171<br>(2)     | 0.108<br>(4)        | 0.093<br>(7) |
| Pemasaran                | 0.185<br>(3) | 0.130<br>(4)         | 0.254<br>(1) | 0.076<br>(5) | 0.065<br>(7)     | 0.221<br>(2)        | 0.069<br>(6) |

|                           |              |              |              |                  |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tata Kelola<br>Pemerintah | 0.403<br>(1) | 0.161<br>(2) | 0.136<br>(3) | 0.06<br>5<br>(7) | 0.075<br>(5) | 0.067<br>(6) | 0.093<br>(4) |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan urutan prioritas secara horizontal

Dikaitkan dengan hasil analisis faktor usahatani berdasarkan perspektif petani dengan metode SEM yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diperoleh gambaran kebijakan yang diperlukan bagi pengembangan usahatani kakao di Indonesia. Sebagai contoh, pada faktor sumberdaya manusia, kebijakan yang diharapkan seperti mengembangkan program pendidikan dan pelatihan terkait pertanian, termasuk pengembangan kakao. Mengingat petani kakao cukup banyak yang masuk usia lanjut, program pendidikan dan pelatihan tersebut juga hendaknya ditujukan untuk menarik minat generasi muda agar tertarik dan mau berusahatani kakao. Berkaitan dengan faktor teknologi, pemerintah juga diharapkan membuat kebijakan yang dapat mendorong dihasilkannya berbagai teknologi pengembangan kakao, mulai dari aspek hulu sampai hilir, dan mulai dari budidaya sampai pengolahan dan pemasaran. Kebijakan yang mendorong pengembangan kelembagaan kakao juga perlu dikeluarkan, diantaranya kebijakan terkait pengembangan kelembagaan penyuluhan, pengaturan kegiatan LSM dalam mendampingi petani kakao, pengembangan kelompok tani, pengembangan lembaga permodalan, serta pengaturan lembaga pemasaran. Dalam hal permodalan, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap permodalan, diantaranya membuat skim-skim kredit yang lebih dapat diakses oleh petani kakao, dan mendorong lembaga keuangan dan perbankan untuk lebih meningkatkan porsi pembiayaan kepada petani kakao.

### Hubungan Tujuan dengan Aktor

Hasil pengolahan AHP antara elemen tujuan dengan aktor memperlihatkan bahwa semua aktor yang berperan dalam pengembangan usahatani kakao memiliki tujuan sama yaitu peningkatan produksi dan mutu biji kakao (Tabel 3). Apabila ditelaah lebih jauh, selain mendukung pencapaian tujuan produksi dan mutu biji kakao, setiap aktor juga mendukung pencapaian tujuan yang lain. Pemerintah, penyuluh dan petugas, serta petani mendukung pencapaian tujuan kesejahteraan petani, sementara LSM, lembaga keuangan, industri pengolahan, dan lembaga penelitian dan pengembangan mendukung pencapaian tujuan harga biji kakao.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa apabila ingin mengembangkan usahatani kakao di Indonesia secara sungguh-sungguh maka harus melibatkan semua aktor tersebut, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), penyuluh dan petugas, petani, LSM, lembaga keuangan, industri pengolahan dan lembaga penelitian. Semua aktor harus terlibat karena masing-masing memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lain, namun saling mendukung. Seluruh aktor sepakat bahwa tujuan pengembangan usahatani kakao adalah peningkatan produksi dan mutu biji kakao. Hal

ini sejalan dengan tujuan pengembangan kakao nasional yaitu kedaulatan dan kemandirian pangan, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan industri pengolahan nasional. Agar semua aktor dapat berperan maksimal maka perlu disusun dokumen peta jalan pengembangan kakao dengan tujuan peningkatan produksi dan mutu biji kakao yang menggambarkan peran dari masing-masing aktor secara jelas.

**Tabel 33 Hubungan tujuan dengan aktor**

| Aktor                | Produksi dan mutu biji kakao | Tujuan           |                               |
|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
|                      |                              | Harga biji kakao | Kesejahteraan keluarga petani |
| Pemerintah           | 0.435 (1)                    | 0.260 (3)        | 0.305 (2)                     |
| Penyuluh dan Petugas | 0.499 (1)                    | 0.232 (3)        | 0.270 (2)                     |
| Petani               | 0.632 (1)                    | 0.184 (3)        | 0.184 (2)                     |
| LSM                  | 0.502 (1)                    | 0.268 (2)        | 0.230 (3)                     |
| Lembaga Keuangan     | 0.459 (1)                    | 0.272 (2)        | 0.269 (3)                     |
| Industri Pengolahan  | 0.476 (1)                    | 0.266 (2)        | 0.258 (3)                     |
| Litbang              | 0.543 (1)                    | 0.229 (2)        | 0.228 (3)                     |

## SIMPULAN

### Simpulan

Analisis strategi pengembangan usahatani kakao dilakukan untuk memperoleh strategi yang dinilai paling efektif untuk mengembangkan usahatani kakao di Indonesia. Hasil pengolahan dari jawaban pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa strategi yang paling efektif untuk pengembangan usahatani kakao adalah pengembangan kelembagaan petani dan pendampingan penerapan teknologi, dengan perolehan nilai bobot 0.309. Tiga alternatif strategi yang lain yaitu strategi sinergitas pemangku kepentingan memperoleh bobot nilai 0.245, strategi regulasi kemitraan dengan pedagang dan industri mendapat bobot nilai 0.224, dan strategi perluasan akses permodalan memperoleh bobot nilai 0.222. Tiga strategi terakhir memiliki bobot nilai yang relatif hampir sama, yang mengisyaratkan bahwa ketiga strategi tersebut perlu mendapat perhatian secara bersamaan.

Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa tujuan yang paling utama bagi pengembangan usahatani kakao adalah peningkatan produksi dan mutu biji kakao, dengan perolehan nilai bobot 0.503. Aktor yang berperan penting dalam pengembangan usahatani kakao adalah pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan perolehan nilai bobot 0.269. Faktor yang paling penting untuk menjadi perhatian dalam pengembangan usahatani kakao adalah sumberdaya manusia, dengan perolehan nilai bobot 0.193.

## DAFTAR PUSTAKA

- [AIKI] Asosiasi Industri Kakao Indonesia. 2017. Industri Pengolahan Kakao di Indonesia [paper]. Jakarta (ID): AIKI.
- Akudugu MA, Guo E, Dadzie SK. 2012. Adoption of modern agricultural production technologies by farm households in Ghana: what factors influence their decisions? *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*. 2(3), 1-14
- Ampaire EL, Macheche CL, Birachi E. 2013. The role of rural producer organizations in enhancing market participation of smallholder farmers in Uganda: Enabling and disabling factors. *African Journal of Agricultural Research*. 8(11), 963-970
- Arimbawa P. 2013. Peran kelembagaan agribisnis dalam usahatani kakao. *Sumber*, 130(141.433), 149-754.
- Arsyad M. 2013. Penguatan kelembagaan menuju kesejahteraan petani. pengalaman dari kondisi terkini petani kakao di Sulawesi. Di dalam: La Rianda, Padangaran AM, Widayati W, editor. *Meningkatkan Daya Saing Kakao untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha Lain*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Kakao; 2013 Februari 11-12; Kendari, Indonesia. Kendari (ID): Unhalu Press, 217-228
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Kakao Indonesia 2016*. Jakarta (ID): BPS.
- Bambang. 2003. *Formulasi Strategi Pengembangan Agribisnis Kakao Rakyat Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Barani AM. 2010. *Bukan sebuah mimpi. Menjadi produsen kakao terbesar di dunia*. Jakarta (ID): PT Ideals Agro Abrar.
- Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun Kementan). 2013. *Laporan dampak pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2009-2012*. Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun Kementan). 2018. *Statistik Perkebunan Indonesia. 2016-2018 Kakao*. Kementerian Pertanian
- Fitriana N, Tarumun S, Tety E. 2014. Analisis daya saing biji kakao Indonesia di pasar internasional. *Jom Faperta*. 1(2)
- Hariyati Y. 2012. Pendapatan dan faktor yang mempengaruhi petani melakukan fermentasi kakao di Kabupaten Jembrana. *DwijenAGRO*. 3(2), 67-73
- Hasan N, Roswita R. 2013. Peningkatan produktivitas dan mutu kakao melalui diseminasi multi-channel (DMC) di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Teknologi Pertanian*. 8(2), 75-82

- Hasibuan AM, Nurmalina R, Wahyudi A. 2012. Analisis kinerja dan daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. *Buletin RISTRI*. 3(1), 57-70
- Hernanto F. 1980. *Usahatani Penataran Rural Credit Project-BRI*. [paper]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Hidayanto M, Supiandi S, Yahya S, Amien LI. 2009. Analisis keberlanjutan perkebunan kakao rakyat di Kawasan perbatasan pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*. 27(2), 213-229
- Ibrahim SS, Aliero HM. 2012. An analysis of farmers' access to formal credit in the rural areas of Nigeria. *African Journal of Agricultural Research*. (47), 6249-6253
- Iqbal M, Dalimi A. 2006. Kebijakan pengembangan agribisnis kakao melalui Primatani: kasus Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 4(1), 39-53
- Jaweng RE, Augustine TE, Prawira MY, Jannah AN. 2016. Upaya peningkatan produktivitas kakao di Kabupaten Donggalaa Sulawesi Tengah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Kementerian Pertanian dan Bappenas. 2011. Laporan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2009-2010.
- Listyati D, Sudjarmoko B, Hasibuan AM. 2014. Identifikasi faktor penentu dalam peningkatan adopsi benih unggul kakao oleh petani. *J.TIDP*. 2(3), 123-132
- Maulana A, Kartiasih F. 2017. Analisis ekspor kakao olahan Indonesia ke Sembilan negara tujuan tahun 2000-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*. 17(2), 103-117
- Mulyono D. 2016. Harmonisasi kebijakan hulu-hilir dalam pengembangan budidaya dan industri pengolahan kakao nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 7(2), 185-200.
- Murwito IS, Mulyati S. 2013. Upaya Peningkatan Produktivitas Kakao di Kabupaten Sikka. Laporan Studi. Kerjasama Ford Foundation dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Prawiranegara D, Sumardjo Lubis DP, Harijati S. 2015. Strengthening role of farmer institution in enhance of innovation capability based on ICT in West Java Province, Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*. 5(12), 128-136
- [Pusdatin Kementan] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2016. Outlook Komoditi Kakao. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.

[Pusdatin Kementan] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2017. Data ekspor dan impor kakao. Kementerian Pertanian.